

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan menyatakan tidak berpolitik praktis artinya tidak terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan proses perjuangan kekuasaan sebagaimana diperankan kekuatan politik formal. Menurut Nashir (2000:49) dalam momentum-momentum tertentu, persoalan politik pun senantiasa masuk ke dalam gerakan organisasi Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak bersikap pasif dan tidak tahu sama sekali akan politik. Muhammadiyah justru berpandangan bahwa dengan berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari tujuan dan fungsi melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara diwujudkan dalam langkah yang strategis sesuai kepribadian, keyakinan dan khittah perjuangannya.

Muhammadiyah dalam bidang politik memperlihatkan sikap yang beragam. Suatu saat tampil sebagai pihak yang kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung bahkan ikut dalam pemerintahan. Suatu saat menjadi bagian kekuatan politik tertentu dan saat yang lain menjadi organisasi yang tidak memiliki hubungan dengan parpol manapun.

Muhammadiyah mempunyai potensi untuk mengambil peran yang strategis dalam bidang politik. Menurut Maryadi (2000:64) hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu.

1. Kebesaran organisasi Muhammadiyah yang memungkinkan jangkauan dan pengaruh politik yang sangat luas.
2. Kualitas sumber daya manusia Muhammadiyah yang relatif tinggi memungkinkan peran politik yang lebih signifikan.
3. Kemandirian Muhammadiyah menentukan daya tawar politik yang tinggi.
4. Karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan yang mengusung modernisme Islam merupakan ruang spesifik dan otentik bagi agenda politik Muhammadiyah

Muhammadiyah yang menegaskan diri sebagai gerakan yang konsisten dengan kegiatannya sosialnya, telah memberikan citra tersendiri bagi perkembangan politik nasional di tengah perubahan politik. Citra tersebut tidak diperankan di dalam ruang politik formal, tetapi pada posisi dan eksistensinya sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan watak kemodernannya telah memberikan kontribusi nilai bagi perkembangan wacana politik di Indonesia

Muhammadiyah pernah beberapa kali terlibat dalam partai politik, ikut dalam proses pembentukannya bahkan menjadi kekuatan intinya. Meski statusnya sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah justru lebih banyak bersinggungan dengan politik praktis. Kedekatan KH. Ahmad Dahlan dengan Sarekat Islam (SI)

dapat dikatakan sebagai titik awal Muhammadiyah bersinggungan dengan politik dan mempunyai peranan dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Pada era berikutnya, ketika KH. Mas Mansyur menjadi pimpinan umum Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi penggagas berdirinya Partai Islam Indonesia (PII), MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) dan masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah merupakan organisasi yang mendukung berdirinya Masyumi. Pada tahun 1968 dalam masa kepemimpinan Muhammad Faqih Usman, Muhammadiyah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) menjadi penggagas lahirnya Parmusi.

Keterlibatan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis di satu pihak memberi keuntungan tersendiri bagi perkembangan organisasi, terutama dalam membangun relasi sosial politik ke pusat-pusat pengambilan keputusan (kekuasaan). Akan tetapi dapat juga membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi organisasi Muhammadiyah yaitu perhatian lebih terhadap politik kepartaian membuat amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial keagamaan dirasakan kurang mendapat perhatian daripada periode sebelumnya.

Keterlibatan Muhammadiyah dengan politik telah menimbulkan masalah-masalah internal dalam organisasi Muhammadiyah. Hal itu menyebabkan adanya perdebatan antar anggota Muhammadiyah yaitu tetap bertahan pada kiprah politik atau keluar dari politik. Hal tersebut menyebabkan adanya keinginan untuk kembali ke gerakan dakwah yang lebih membangun masyarakat.

Sejak itulah direncanakan sebuah konsep yang meneguhkan jati diri Muhammadiyah, sehingga tahun 1962 dirumuskan kepribadian Muhammadiyah.

Konsep itulah yang menjiwai dan menjadi mata rantai perumusan khittah Muhammadiyah tahun 1971 yang menjadi acuan pokok bagi Muhammadiyah dalam menghadapi politik.

Khittah 1971 yang berlaku sampai saat ini berisi dua garis langkah Muhammadiyah yaitu:

1). Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. 2). Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah (Nashir. 2000:53).

Tokoh-tokoh Muhammadiyah akhirnya menyadari bahwa politik bukan tempat yang tepat dan nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, konflik kepentingan sangat mendominasi perilaku politisi. Keputusan muktamar tersebut dinilai sebagai keputusan yang antisipatif dan demokratis.

Untuk itu, sampai sekarang masih dijadikan dasar bagi Muhammadiyah dalam menyikapi kehidupan politik di Indonesia. Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk berdakwah ke semua partai politik dan memberikan kebebasan kepada anggota Muhammadiyah untuk memasuki partai politik yang sesuai dengan keinginannya.

Pada masa sekarang, Muhammadiyah seringkali diidentikkan dengan partai tertentu. Hal tersebut semata-mata adalah upaya Muhammadiyah untuk tetap mempunyai peranan dalam kehidupan bangsa dan negara. Muhammadiyah dalam menghadapi politik, tetap mempunyai patokan yang mengacu kepada

khittahnya sebagai gerakan organisasi keagamaan, tetapi seringkali disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pada masa perkembangan Muhammadiyah sekarang ini, para pimpinan Muhammadiyah akhirnya memilih untuk mengambil jalan “aman” dalam menghadapi politik.

Salah satu contohnya adalah sewaktu Muhammadiyah menjadi penggagas lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai oleh Amien Rais. Muhammadiyah mengambil sikap dengan berijtihad dalam menghadapi politik atau yang lebih dikenal dengan “ijtihad politik”. Ijtihad tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindakan bagi umat Islam apabila ada suatu perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits, padahal sangat diperlukan adanya suatu sikap atau tindakan untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai kebaikan.

Dari latar belakang masalah penelitian di atas, dapat disimpulkan alasan peneliti mengambil tema “Peranan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia” yaitu: Pertama, Muhammadiyah selama ini menyatakan bahwa sifat gerakannya adalah sosial keagamaan, tetapi ternyata di dalam perjalanannya, Muhammadiyah pernah ikut terlibat dalam dunia politik. Meskipun dalam perkembangannya Muhammadiyah memutuskan untuk lepas dari partai politik.

Kedua, Muhammadiyah meskipun pernah beberapa kali ikut serta mendukung partai politik, tetapi tidak pernah menjadi partai politik mandiri seperti yang pernah dilakukan NU. Muhammadiyah justru semakin mengukuhkan jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui alasan yang mendasari Muhammadiyah terlibat dalam dunia politik

dan bagaimana akhirnya Muhammadiyah lepas dari partai politik dan tetap konsisten berada dalam jalur dakwah *amar makruf nahi munkar*.

Sesuai dengan alasan-alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Peranan Muhammadiyah dalam Kancah Perpolitikan di Indonesia (1945-1971)”**. Periodisasi waktu yang akan diteliti yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1971.

Pada periodisasi ini, Muhammadiyah beberapa kali terlibat dengan partai politik diantaranya Masyumi dan Parmusi, tetapi peranan Muhammadiyah yang cukup besar adalah ketika menjadi anggota istimewa Masyumi. Pada tahun 1971 akhirnya Muhammadiyah mengeluarkan keputusan berdasarkan perumusan khittah dari hasil muktamar yang menyatakan bahwa sejak saat itu Muhammadiyah tidak terikat dengan organisasi politik manapun.

B. Perumusan Masalah

Bagian ini akan diarahkan kepada perumusan masalah yang menjadi bagian penting dalam penelitian. Adapun masalah pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia?”

Untuk memudahkan dan mengarahkan dalam pembahasan. Peneliti telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam bentuk-bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang keterlibatan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia?

2. Bagaimana usaha yang diperankan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia?
3. Bagaimana dampak keterlibatan Muhammadiyah dalam partai politik terhadap keutuhan organisasi Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk:

1. Menjelaskan latar belakang Muhammadiyah ikut terlibat dalam kancah perpolitikan di Indonesia yang mencakup awal mula dan tujuan Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap partai politik.
2. Memaparkan usaha yang diperankan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia yang membahas mengenai peranan Muhammadiyah dalam politik seperti ikut serta dalam pembentukan partai politik dan menjadi anggota dari parpol tersebut.
3. Menjelaskan dampak keterlibatan Muhammadiyah dalam beberapa partai politik terhadap keutuhan organisasi Muhammadiyah. Pembahasan ini meliputi perdebatan di dalam organisasi Muhammadiyah tentang keterlibatan dalam partai politik, sampai kepada perumusan khittah mengenai sikap politik Muhammadiyah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Metode merupakan prosedur, teknik, atau cara-cara yang sistematis dalam melakukan suatu penyidikan (Helius Sjamsuddin. 1996:60). Metode sejarah menurut Winarno Surakhmand (1979:172) adalah suatu metode yang mencoba mencari kejelasan atas suatu gejala masa lampau untuk menemukan dan memahami kenyataan yang berguna bagi kehidupan sekarang dan akan datang.

Metode historis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang telah terjadi, prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lampau juga peristiwa-peristiwa masa kini, bahkan secara terbatas digunakan untuk mengantisipasi hal-hal dimasa yang akan datang (John W. Best, 1985:42).

Menurut Ismaun (1992:125-126), dalam penelitian sejarah ada beberapa tahapan yang harus ditempuh yakni :

a. Heuristik

Heuristik adalah menemukan jejak-jejak atau sumber-sumber dari sejarah suatu peristiwa yang kemudian dirangkai menjadi satu kisah. Tahap heuristik merupakan langkah awal dengan melakukan pencarian terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari kajian literatur maupun studi kepustakaan dari buku-buku, jurnal, majalah, koran dan sumber literatur lain yang berkaitan dan relevan dengan judul yang sedang digarap.

b. Kritik

Kritik sejarah atau kritik sumber adalah metode untuk menilai sumber yang kita butuhkan untuk mengadakan penulisan sejarah. Penilaian sumber

sejarah memiliki dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal dari sumber sejarah. Sumber-sumber yang kita peroleh sebelumnya harus dikritik terlebih dahulu apakah sumber tersebut benar atau tidak. Kritik eksternal digunakan untuk meneliti kebenaran sumber-sumber yang diperoleh, sedangkan kritik internal untuk mengetahui keaslian aspek materi sumber, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta mengenai pembahasan skripsi yang dikaji

c. Interpretasi

Pada tahap interpretasi ini, peneliti berusaha mencari berbagai hubungan antara berbagai fakta tentang peranan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga diperoleh sebuah analisis yang didukung oleh konsep-konsep atau generalisasi tertentu yang relevan dalam pembahasan skripsi.

d. Historiografi

Merupakan tahap akhir dari kegiatan intelektual yang memerlukan kemampuan daya pikir. Historiografi disebut juga penulisan sejarah, sumber-sumber sejarah yang ditemukan, dianalisis dan ditafsirkan selanjutnya ditulis menjadi suatu kisah sejarah yang selaras atau sebuah cerita ilmiah dalam tulisan berbentuk skripsi.

2. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara dan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, internet dll yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami penulisan ini, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam melakukan penelitian ini. Beberapa hal yang akan dibahas pada bab ini adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai daftar literatur yang dipergunakan yang dapat mendukung dalam penulisan.

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara-cara pengolahan sumber serta analisis dan cara penulisannya.

BAB IV MUHAMMADIYAH DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA

Dalam pembahasan mencakup uraian berisi penjelasan yang menjadi kajian dalam perumusan masalah yaitu mengenai latar belakang keterlibatan Muhammadiyah dalam politik, usaha yang diperankan Muhammadiyah dalam partai politik serta dampak keterlibatan Muhammadiyah dalam beberapa partai politik terhadap keutuhan organisasi, sampai kepada perumusan khittah 1971.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang diangkat.

